



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jalan : Kapten P. Tendean No.06 Palembang Provinsi Sumatera Selatan
Telepon : (0711) 311050, 356094 Faksimile : (0711) 356094 Kode Pos.30126
website : www.bkd.sumselprov.go.id/E-Mail : bkd@sumselprov.go.id

Palembang, 15 April 2025

Nomor : 800/5000/BKD.Sekr/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 Exp
Hal : Laporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan Triwulan I TA. 2025
BKD Prov. Sumsel

Yth : Kepala Bappeda Prov. Sumsel
di
Palembang

Menindaklanjuti surat Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 000.7.2.8/0385/Bappeda-V/2025 tanggal 17 Februari 2025 hal Laporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan Tahun Anggaran 2025, bersama ini kami sampaikan Laporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan Triwulan I TA. 2025 Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan, berikut *hard copy* dan *soft copy* sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala,



H. ISMAIL FAHMI, S.IP., M.Si.
Pembina Utama Muda(IV/c)
NIP 196812151989031002



LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM KEGIATAN PEMBANGUNAN SUMATERA SELATAN TRIWULAN I TAHUN ANGGARAN 2025



**BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN PEMBANGUNAN
APBD PROVINSI SUMATERA SELATAN
TRIWULAN I TAHUN ANGGARAN 2025
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROV. SUMSEL**

I. PENDAHULUAN

a. Gambaran Umum

1. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan ialah Mewujudkan Peningkatan Kualitas Manajemen Aparatur Sipil Negara yang Efektif dan Efisien dalam Pelayanan Publik secara Profesional.

Makna tujuan ini, **Manajemen ASN** adalah pengelolaan SDM Aparatur untuk menghasilkan SDM Aparatur yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme

2. Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam kurun waktu 2024-2026 :

1. Meningkatkan Profesionalitas ASN Pemerintah Prov. Sumsel.
2. Meningkatkan Tata Kelola ASN Pemprov. Sumsel.
3. Meningkatnya tingkat kepuasan ASN yang melakukan layanan kepegawaian pada BKD Prov. Sumsel (Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kepegawaian).

3. Belanja, Program APBD dan Kegiatan

a) Belanja Perangkat Daerah

Dalam rangka mendukung pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 telah dialokasikan Anggaran yang bersumber dari dana alokasi APBD Provinsi Sumatera Selatan sebesar Rp 24.456.517.831,- (Dua puluh empat milyar empat ratus lima puluh enam juta lima ratus tujuh belas ribu delapan ratus tiga puluh satu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

Total Belanja	:Rp. 24.456.517.831,-
1. Belanja Operasi	: Rp. 21.921.517.831,-
a. Belanja Pegawai	: Rp. 14.991.570.000,-
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	: Rp. 6.183.164.000,-
Belanja Pegawai Lainnya	: Rp. 8.808.406.000,-
b. Belanja Barang/Jasa	: Rp. 6.929.947.831,-
2. Belanja Modal	: Rp. 2.535.000.000,-

b) Program dan Anggaran APBD

Anggaran Belanja tersebut terdiri atas 2 Program, 11 Kegiatan dan 35 Subkegiatan, sebagai berikut:

- a) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi, dengan kegiatan:

- ✓ Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan subkegiatan:
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- ✓ Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan subkegiatan:
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- ✓ Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan subkegiatan:
 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
- ✓ Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan subkegiatan:
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - Fasilitas Kunjungan Tamu
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
- ✓ Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan subkegiatan:
 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Pengadaan Mebel
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- ✓ Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan subkegiatan:
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- ✓ Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan subkegiatan:
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

b) Program Kepegawaian Daerah, dengan kegiatan:

- ✓ Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN dengan subkegiatan:
 - Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK
 - Fasilitasi Lembaga Profesi ASN
 - Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian
- ✓ Mutasi dan Promosi ASN dengan subkegiatan:
 - Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN
 - Pengelolaan Promosi ASN
- ✓ Pengembangan Kompetensi ASN dengan subkegiatan:
 - Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN
 - Pembinaan Jabatan Fungsional ASN
- ✓ Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur dengan subkegiatan:
 - Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
 - Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai
 - Pembinaan Disiplin ASN

4. Indikator Kinerja Perangkat Daerah (Renstra) dan Indikator Kinerja Daerah (RPJMD)

a. Indikator Kinerja Perangkat Daerah (Renstra)

1. Nilai Sistem Merit
2. Nilai IP ASN
3. Nilai NSPK
4. Rasio Pejabat Fungsional bersertifikat Kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)
5. Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)
6. Rasio Pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)
7. Persentase Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kepegawain

b. Indikator Kinerja Daerah (RPJMD)

1. Rasio Pejabat Fungsional bersertifikat Kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)
2. Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)
3. Rasio Pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)

b. Latar Belakang Penyusunan Laporan

Maksud dan Tujuan penyusunan laporan ini adalah memenuhi amanat Surat Edaran Gubernur Nomor : 001/SE/Bappeda/2021 tanggal 13 Januari 2021 tentang Pedoman Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2021 serta sebagai bahan masukan PD dalam menyusun perencanaan tahun berikutnya.

II. EVALUASI KINERJA PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN HINGGA BULAN INI

Hasil evaluasi pelaksanaan program/kegiatan APBD Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 sampai dengan Triwulan I pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan antara lain sebagai berikut :

a) Realisasi Pelaksanaan Program/Kegiatan APBD Prov. Sumsel

Uraian	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Keuangan (%)		Fisik (%)	
			Target s.d Bulan ini	Realisasi s.d. Bulan Ini	Target s.d Bulan ini	Realisasi s.d. Bulan ini
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3/2*100)	(6)	(7)
Belanja Daerah	24.456.517.831	3.510.265.673	17.90	14.35	17.90	15.86
Belanja Operasi	21.921.517.831	3.510.265.673	35.79	16.01	35.79	16.33
- Belanja Pegawai	14.991.570.000	3.218.977.571	25.36	21.47	25.36	21.47
- Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	6.183.164.000	1.498.861.602	30.88	24.24	30.88	24.24
- Belanja Pegawai Lainnya	8.808.406.000	1.720.115.969	19.84	19.53	19.84	19.53
- Belanja Barang/Jasa	6.929.947.831	291.288.102	46.22	4.20	46.22	5.20
Belanja Modal	2.535.000.000	-	-	-	-	-

1) Realisasi Belanja Daerah

Realisasi Keuangan Total Belanja Daerah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan triwulan ini sebesar Rp. **3.510.265.673,-** atau **14.35%** dan realisasi fisik **15.86%**.

2) Realisasi Belanja Operasi

Realisasi Keuangan Belanja Operasi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan triwulan ini sebesar Rp. **3.510.265.673,-** atau **16.01%** dan realisasi fisik **16.33%**.

3) Realisasi Belanja Modal

Realisasi Keuangan Belanja Modal Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan bulan ini sebesar Rp **0,-** atau **0%** dan realisasi fisik **0%**.

i. Realisasi Keuangan

1. Rendah, Kegiatan dengan realisasi 0 – 65 % : 1 subkegiatan
2. Sedang, Kegiatan dengan realisasi 66 – 90% : 13 subkegiatan
3. Tinggi, Kegiatan dengan realisasi > 90% : 18 subkegiatan

ii. Realisasi Fisik

1. Rendah, Kegiatan dengan realisasi 0 – 65 % : 0

2. Sedang, Kegiatan dengan realisasi 66 – 90 % : 0
3. Tinggi, Kegiatan dengan realisasi > 90 % : 32 subkegiatan

b) Indikator Kinerja SKPD

Indikator Kinerja SKPD berdasarkan Renstra Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 – 2026 :

Realisasi Indikator Kinerja SKPD (berdasarkan RENSTRA)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Realisasi	Capaian	Ket
1	Meningkatkan Profesionalitas ASN Pemprov. Sumsel	Nilai IP ASN	%	81	-	-	Belum rilis
		Nilai NSPK	%	90	-	-	Belum rilis
2	Meningkatnya Tata Kelola ASN	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	100	651,80	100	Telah sesuai target
		Rasio Pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	12	15,75	100	Telah sesuai target
		Rasio Pejabat Fungsional bersertifikat Kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	80	89,96	100	Telah sesuai target
3	Meningkatkan Tingkat Kepuasan ASN yang melakukan layanan Kepegawaian pada BKD Prov. Sumsel	Persentase Hasil Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kepegawaian	%	90	83,19	92,43	Belum sesuai target karena masih berjalan

c) Indikator RPD

Indikator RPD Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 – 2026 adalah sebagai berikut:

Pencapaian Target Capaian Indikator Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2026

No	Urusan dan Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja 2022		Realisasi Kinerja 2023		Realisasi Kinerja 2024		Kinerja 2025			Faktor Penghambat/Faktor Pendorong
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi s.d TW I	Capaian	
1	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	100	600,35	100	613,86	100	636,65	100	651.80	100	Telah sesuai target
2	Rasio Pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	9	14,86	9,46	14,21	9	15,27	12	15,75	100	Telah sesuai target
3	Rasio Pejabat Fungsional Bersertifikat Kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	100	100	100	100	100	100	80	89,96	100	Telah sesuai target

- Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) Tahun 2025 targetnya tetap sama dengan target Tahun 2024 yaitu 100% dengan realisasi sebesar 651,80% atau dengan capaian 100%.

- 1) Capaian Indikator tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:
Capaian sasaran kinerja ini dihitung dan dinilai dari perbandingan Jumlah Pegawai (PNS) yang memiliki Pendidikan (PT) ke atas berbanding dengan Jumlah Pegawai (PNS) yang memiliki Pendidikan SMA kebawah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan).
- 2) Yang dihitung dalam Capaian sasaran kinerja ini adalah seluruh Pegawai (PNS) diluar PNS Fungsional Guru dan Tenaga Kesehatan, seperti JFT lainnya, JFU dan Struktural
- 3) Capaian indikator kinerja ini adalah:

$$= \frac{\text{Jumlah Pegawai menurut pendidikan PT ke atas}}{\text{Seluruh jumlah pegawai dengan pendidikan SMA kebawah}} \times 100\%$$

$$= \frac{4.165}{639} \times 100\%$$

$$= \mathbf{651,80\%}$$

$$\text{Capaian Kinerjanya } 651,80\% / 100\% = \mathbf{100}$$

- Target Rasio Pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) pada tahun 2025 sebesar 12% dengan realisasi 15,75% dan capaian realisasi 100%.

Capaian indikator kinerja pada tahun 2024, dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Target Rasio Pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) pada tahun 2025 sebesar 12%. Untuk Capaian sasaran kinerja ini yang di hitung dan dinilai adalah perbandingan dari Jumlah Pegawai (PNS) yang Fungsional (diluar guru dan tenaga kesehatan) berbanding dengan Seluruh Jumlah Pegawai (PNS) (tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan).
- 2) Yang dihitung dalam Capaian sasaran kinerja ini adalah seluruh Pegawai (PNS) Fungsional Tertentu (JFT) diluar Pegawai (PNS) Fungsional Guru dan Tenaga Kesehatan, seperti JFT Arsiparis, Pustakawan, Peneliti, dan lain-lain.
- 3) Capaian indikator kinerja ini adalah:

$$= \frac{\text{Jumlah Pegawai PNS Fungsional (di luar Guru dan Tenaga Kesehatan)}}{\text{Seluruh jumlah pegawai pemerintah (PNS tidak termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan)}} \times 100\%$$

$$= \frac{757}{4.804} \times 100\%$$

$$= \mathbf{15,75\%}$$

$$\text{Capaian Kinerjanya } 15,75\% / 12\% = \mathbf{100\%}$$

- Target Rasio Pejabat Fungsional Bersertifikat Kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) pada tahun 2025 sebesar 80% dengan realisasi sampai dengan Triwulan I sebesar 94,45% dan capaian realisasi 100% .

Capaian indikator kinerja pada tahun 2025, dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Target Rasio Pejabat Fungsional Bersertifikat Kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan pada tahun 2025 sebesar 80% dengan realisasi 94,45% dan capaian realisasi 100%. Untuk Capaian sasaran kinerja ini yang di hitung dan dinilai adalah perbandingan dari Pejabat Fungsional Bersertifikat Kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) berbanding dengan Seluruh Jumlah Pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan).
- 2) Yang dihitung dalam Capaian sasaran kinerja ini adalah seluruh Pegawai (PNS) Fungsional Tertentu (JFT) yang Bersertifikat Kompetensi (diluar Pegawai (PNS) Fungsional Guru dan Tenaga Kesehatan).
- 3) Capaian indikator kinerja ini adalah:

Jumlah Pegawai Fungsional yang memiliki sertifikat Kompetensi
= $\frac{\text{Seluruh Jumlah Pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)}}{\text{Jumlah Pegawai Fungsional Bersertifikat Kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)}} \times 100\%$

= $\frac{681}{757} \times 100\%$

= **89,96%**

Capaian Kinerjanya 89,96% / 100% = **100%**

III. KENDALA YANG DIHADAPI DAN SARAN TINDAK LANJUT

Pelaksanaan Program dan Kegiatan yang di danai APBD sampai dengan Triwulan I Tahun Anggaran 2025 telah berjalan sebagaimana yang direncanakan.

IV. PENUTUP

Demikian Laporan ini kami buat, diharapkan pelaksanaan program dan kegiatan yang didanai APBD sampai dengan Triwulan I ini dapat meningkatkan efektivitas dalam pencapaian kinerja penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Palembang, 15 April 2025

Kepala,



H. Ismail Fahmi, S.IP., M.Si.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 196812151989031002